

Asas praduga sah bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/Pid/2010 = Presumption of validity principle for notary in regards to the deed they made : case study Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1099 K/Pid/2010 / Monika Yulianti Hadiwidjaja

Monika Yulianti Hadiwidjaja, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20335552&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Notaris San Smith dihukum penjara selama 2 tahun karena “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik” dengan cara menempatkan SitePlan dalam AJB yang berbeda dengan yang telah disetujui dalam PPJB. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa menggunakan Notaris dan PPAT berbeda dalam pembuatan PPJB dan AJB; dan sanksi bagi Notaris berkaitan dengan akta yang memuat keterangan palsu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa alasan memilih Notaris dan PPAT yang berbeda dalam pembuatan PPJB dan AJB, salah satunya adalah adanya itikad tidak baik, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris adalah sanksi perdata, administratif, etika, dan pidana.

ABSTRACT

Notary San Smith was jailed for 2 years for participating in putting false information into authentic deed by placing different Siteplan in AJB than the Siteplan in the PPJB. This thesis will discuss the reasons of using different Notary and PPAT to make PPJB and AJB, and penalties for the Notary in regards of authentic deed which contains false information. The conclusion is that there are several reasons to choose different Notary and PPAT in making PPJB and AJB, one of which is the existence of bad faith, and the sanctions that may be imposed against the Notary are civil, administrative, ethical, and criminal penalties.